

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PADA INSTANSI PEMERINTAH

Eka Ratna Aprianti
Ekaratna415@gmail.com
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to examine the influence of accountability, transparency, and oversight to the budget implementation performance. This research is a quantitative research. The population is local apparatus work unit at the environment of local government of Mojokerto district. The sample collection technique has been collected by using purposive sampling method. The data collection technique has been done by conducting survey method. The data has been done by using primary data in the form of questionnaires which have been issued to the respondents. The analysis method has been carried out by using multiple linear regressions analysis and the application instrument of SPSS (Statistical Product and Services Solutions) 20.0 version. The result of this research shows that the presentation of accountability gives positive influence to the implementation performance, transparency gives positive influence to the budget implementation performance and oversight gives positive influence to the budget implementation performance.

Keywords: Accountability, transparency, oversight, budget implementation performance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Mojokerto. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (Statistical Product and Services Solutions) versi 20.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran, transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran.

Kata Kunci: Akuntabilitas, transparansi, pengawasan, kinerja pelaksanaan anggaran.

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang semakin besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non-pemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab.

Akuntansi sektor publik memiliki keterkaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada ranah publik yang memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan akuntansi sektor publik tidak hanya pada jenis dan bentuk organisasinya, tetapi juga pada lingkup lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Salah satu lingkungan yang

mempengaruhi sektor publik yaitu faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, struktur produksi, tenaga kerja, arus modal dalam negeri, ifrasturktur, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dan sektor informasi (Mardiasmo, 2009).

Akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban tersebut diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah. Wujud dari akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dalam pelayanan masyarakat adalah dengan dibuatnya laporan pertanggungjawaban. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi ini terlihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 (PP 8/2006) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kebutuhan akan penggabungan kedua jenis laporan tersebut cukup terpenuhi. Bahkan Penjelasan PP ini juga menyebutkan perlunya pengintegrasian sistem akuntabilitas instansi pemerintah dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintahan.

Akuntabilitas dan transparansi adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi. Ciri utama dalam pengelolaan anggaran adalah akuntabilitas dan transparansi. Salah satu elemen penting dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah adanya pengelolaan anggaran yang baik.

Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak terlepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri (pengawasan melekat). Selain dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri, pengawasan juga dilakukan oleh legislatif dan lembaga pengawas khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Pengawasan terhadap anggaran diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat banyak. Pengelolaan anggaran yang baik merupakan prinsip *Value for Money* dan mutlak dilakukan. Implementasi prinsip *Value for Money* diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik. *Value for Money* merupakan prinsip pengelolaan anggaran sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo, 2005:7).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perangkat daerah (unit kerja pemerintah) yang mendapatkan perincian dari publik terkait dengan pelaksanaan anggaran. Tuntutan agar SKPD ini meningkatkan pelayanan publik di refleksikan melalui kinerja *Value for Money* dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatannya. *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan pelayanan umum yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengelolaan anggaran dikaitkan dengan *Value for Money* karena masih banyaknya anggaran yang belum dilakukan secara ekonomi (biaya yang tinggi, hasil yang minim atau anggaran digunakan tidak berdasarkan pada kebutuhan atau skala prioritas, serta anggaran yang boros).

SKPD seharusnya bisa memperbaiki sejumlah hal yang menjadi penyebab bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran yang tidak berdasar pada *Value for Money*. *Value for Money* harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah karena dalam konteks otonomi daerah, *Value for Money* merupakan jembatan untuk mengantar Pemerintah Daerah mencapai *good governance* yaitu Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi,

serta pengawasan terhadap kinerja anggaran pada instansi pemerintah di Kabupaten Mojokerto.

TINJAUAN TEORITIS

Kinerja Anggaran

Secara umum terdapat berbagai definisi tentang kinerja anggaran. Bastian (2010: 92) mengatakan kinerja anggaran merupakan teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan 30 unit *cost* dari setiap kegiatan yang terstruktur. Maksud terstruktur disini dimulai dari pencapaian tujuan, program dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen.

Halim (2007) mendefinisikan kinerja anggaran sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang diuangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Nordiawan (2006:48), menjelaskan bahwa anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Jadi pengertian anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial.

Anthony dan Govindrajan (2005:17) menegaskan bahwa anggaran perlu disiapkan secara detail dan melibatkan manajer pada setiap level organisasi. Keterlibatan manajer dalam penyusunan anggaran khususnya dalam anggaran sektor publik diharapkan berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan setiap personel yang kompeten pada setiap level organisasi. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, implementasi program pemerintah daerah yang mengkonsumsi sejumlah sumber daya tertentu dapat dievaluasi melalui kinerja yang dihasilkan oleh setiap satuan kerja. Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang meliputi pendapatan dan pengeluaran yang digunakan untuk mengestimasi kinerja di masa yang akan datang.

Value For Money

Mahmudi (2013:83) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 4) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 (tiga) elemen utama yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Ekonomi

Perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi menggambarkan hubungan antara harga pasar dan masukan atau dengan kata lain ekonomi merupakan pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Dimana *input* dalam hal ini merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas.

Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan *output* atau *input*. Pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu. Dimana *output* dalam hal ini merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Menurut Mardiasmo (2009: 132) suatu kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah-rendahnya (*spending well*).

Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*. Yang dimaksud *outcome* dalam hal ini adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Menurut Mardiasmo (2009:132) suatu kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir dan kebijakan (*spending wisely*).

Akuntabilitas

Secara umum, dalam setiap pengelolaan anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilihat dari definisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Keterkaitan atau pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat dilihat dari seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh para pegawai sipil dan otoritas publik. Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program.

Akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati independen yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*), bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja sektor publik.

Akuntabilitas sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik. Mardiasmo (2006:4) lebih lanjut mengidentifikasi tiga elemen utama akuntabilitas, yaitu:

Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otoritas sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing);

Akuntabilitas peran yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (*new public management*). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru; dan

Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsman atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek

subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan ulang seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya.

Transparansi

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Corporate Governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat secara tidak proporsional.

Menurut Mardiasmo (2005), menjelaskan bahwa transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi berarti penjamin kebebasan dan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang bebas didapat, siap tersedia dan akurat yang berhubungan dengan pengelolaan rumah tangga di pemerintah daerah sehingga akan menyebabkan terciptanya pemerintahan daerah yang baik dan memikirkan kepentingan masyarakat. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, (4) Terakomodasinya suara atau usulan rakyat, (5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Pengawasan

Pengawasan (*controlling*) adalah proses pemantauan kegiatan untuk menjaga bahwa suatu kegiatan dilaksanakan terarah dan menuju kepada tercapainya tujuan yang telah direncanakan dengan mengadakan penilaian, tindakan kooperatif terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kurang tepat dengan sasaran yang dituju (Sukirno, 2005). Menurut Terry dan Rue (2005:10), menjelaskan bahwa pengawasan adalah mengukur pelaksanaan tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan, dan mengambil tindakan-tindakan korektif yang diperlukan. Keputusan Presiden No, 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan. Merupakan peran penting dan positif dalam proses manajemen. Menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktunya. Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali agar dapat diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan

koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat tercapai secara maksimal (Pratuvaliandry,2005).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*), bukan hanyapertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Hasil penelitian Anugriani (2014) dalam menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Temuan yang sama diperoleh melalui penelitian Adrianto (2012) bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis, bahwa akuntabilitas memiliki pengeruh terhadap kinerja pelaksanaan anggaran karena setiap pelaksanaan anggaran tersebut diperlukan pertanggungjawaban dan terbuka untuk diperiksa.Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas suatu anggaran.

H1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif. Hasil penelitian Anugriani (2014) dalam menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Temuan yang sama diperoleh melalui penelitian Adrianto (2012) bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis, bahwa transparansi memiliki pengeruh terhadap kinerja pelaksanaan anggaran karena dalam setiap penyelenggaraan pemerintah harus terbuka masyarakat umum. Agar pengumuman anggaran bisa didapat setiap waktu dan mudah didapatkan oleh publik.

H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran

Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pengawasan anggaran daerah dilaksanakan untuk meminimalisir kebocoran anggaran daerah, dengan metode pembukuan yang tertib dan metode pengawasan keuangan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Namun sebelumsampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan mengenai anggaran sehingga nanti ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau penyimpangan alokasi anggaran. Hasil penelitian Anugriani (2014) dalam menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Temuan yang sama diperoleh melalui penelitian Suparno (2012) bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis, bahwa pengawasan memiliki pengaruh terhadap kinerja pelaksanaan anggaran karena pengawasan anggaran dilaksanakan untuk meminimalisir kebocoran anggaran, dengan metode pembukuan yang tertib dan metode pengawasan anggaran daerah sesuai undang-undang

agar efektif dan efisien pada setiap satuan kerja perangkat daerah. H3: Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan survey melalui kuesioner. Sugiyono (2014: 61) menunjukkan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Mojokerto yang berjumlah 30 SKPD.

Teknik Pengambilan Sampel

Sugiono (2014) menunjukkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang digunakan dengan menggunakan kriteria khusus terhadap sampel. Adapun kriteria yang digunakan adalah kepala unit dan sub unit kerja yang memiliki fungsi managerial dan terlibat dalam pelaksanaan anggaran.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner secara langsung kepada responden Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012:137). Data diperoleh dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner yang dilakukan sendiri oleh peneliti kepada responden.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (Variabel Bebas) yaitu variabel yang memengaruhi variabel lain. Variabel Dependen (Variabel Terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (Sanusi, 2014).

Variabel independen yang mempengaruhi terdiri dari Akuntabilitas (AK), Transparansi (TS) dan Pengawasan (PW), sedangkan Variabel Dependen yang dipengaruhi yaitu Kinerja Pelaksanaan (KA).

Definisi Operasional Variabel

Akuntabilitas

publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dapat diukur melalui lima indikator yaitu (1) Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis tersedia bagi stakeholder yang membutuhkan, setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, (2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program, (3) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang

telah diambil dan dikomunikasikan, (4) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat, (5) Sistem informasi manajemen dana monitoring hasil (Krina, 2003 dalam Setiyaningrum, 2017).

Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Corporate Governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi dapat diukur melalui empat indikator yaitu (1) Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, (2) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, (3) Adanya audit yang independen dan efektif, dan (4) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran (Ardianto, 2007 dalam Setiyaningrum, 2017).

Pengawasan

Pengawasan (*controlling*) adalah proses pemantauan kegiatan untuk menjaga bahwa suatu kegiatan dilaksanakan terarah dan menuju kepada tercapainya tujuan yang telah direncanakan dengan mengadakan penilaian, tindakan koperatif terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kurang tepat dengan sasaran yang dituju (Sukirno, 2005:99). Pengawasan dapat diukur melalui tiga indikator yaitu (1) *Input* (masukan) pengawasan, (2) Proses pengawasan, (3) *Output* (keluaran) pengawasan (Gaspersz, 1998 dalam Anugriani, 2014).

Kinerja Anggaran

Sugiyono (2011: 39), "Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas". Variabel terikat (Y) untuk penelitian ini adalah kinerja pelaksanaan anggaran. Kinerja adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Sehingga kinerja pelaksanaan anggaran merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil (*output*) yang didasarkan pada tiga prinsip yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. *Value for Money* dapat diukur melalui dua indikator yaitu (1) Alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi), (2) Kualitas pelayanan (efektivitas) (Mardiasmo, 2002 dalam Setiyaningrum, 2017).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan *Software SPSS for Windows Versi 20.0*. Dimana variabel independen Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan dipengaruhi oleh Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebagai variabel dependen melalui tahapan pengujian sebagai berikut:

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor pertanyaan. Kriteria digunakan valid atau tidak valid apabila koefisien korelasi r kurang dari nilai nilai r_{tabel} dengan tingkat signifikansi 5% berarti butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2006). Berdasarkan pada tabel dibawah dapat dilihat dari keseluruhan masing-masing item variabel. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka

dikatakan valid, dimana r_{tabel} $N=60$ adalah 0,254 disimpulkan bahwa secara keseluruhan item pernyataan dari masing-masing variabel dapat dikatakan valid, karena mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > 0,25$).

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Akuntabilitas	p1	0,323	0,254	Valid
	p2	0,304	0,254	Valid
	p3	0,319	0,254	Valid
	p4	0,401	0,254	Valid
	p5	0,345	0,254	Valid
	p6	0,322	0,254	Valid
	p7	0,325	0,254	Valid
	p8	0,437	0,254	Valid
	p9	0,295	0,254	Valid
Transparansi	tr1	0,351	0,254	Valid
	tr2	0,357	0,254	Valid
	tr3	0,363	0,254	Valid
	tr4	0,287	0,254	Valid
	tr5	0,292	0,254	Valid
	tr6	0,282	0,254	Valid
	tr7	0,325	0,254	Valid
	tr8	0,289	0,254	Valid
Pengawasan	pw1	0,324	0,254	Valid
	pw2	0,355	0,254	Valid
	pw3	0,442	0,254	Valid
	pw4	0,322	0,254	Valid
	pw5	0,323	0,254	Valid
	pw6	0,368	0,254	Valid
	pw7	0,401	0,254	Valid
	pw8	0,313	0,254	Valid
	pw9	0,286	0,254	Valid
Kinerja Pelaksanaan Anggaran	kpa1	0,334	0,254	Valid
	kpa2	0,411	0,254	Valid
	kpa3	0,489	0,254	Valid
	kpa4	0,582	0,254	Valid
	kpa5	0,319	0,254	Valid
	kpa6	0,367	0,254	Valid
	kpa7	0,410	0,254	Valid
	kpa8	0,532	0,254	Valid
	kpa9	0,542	0,254	Valid
	kpa10	0,351	0,254	Valid
	kpa11	0,365	0,254	Valid

Sumber: Data primer diolah 2017

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika memberikan nilai *cronbach alpha* di atas 0,6 (Ghozali, 2006).

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i> (a)	Koefisien <i>alpha</i>	Keterangan
Akuntabilitas	0,612	0,60	Reliabilitas
Transparansi	0,610	0,60	Reliabilitas
Pengawasan	0,635	0,60	Reliabilitas
Kinerja Pelaksanaan Anggaran	0,756	0,60	Reliabilitas

Sumber: Data primer diolah 2017

Berdasarkan Tabel 2 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *cronbach alpha* yang terdapat pada tabel diatas yaitu akuntabilitas 0,612, transparansi 0,610, pengawasan 0,635, dan kinerja pelaksanaan anggaran 0,756 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan pengukuran data sudah dapat dipercaya (*reliable*).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu mengenai akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran pada instansi pemerintah Kabupaten Mojokerto. Data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden, diolah dengan menggunakan SPSS versi 20.0 dengan menggunakan hasil perhitungan yang tersaji pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized coefficients		T	sig
	B	Std. Error		
(Constant)	10,463	5,733	1,825	0,073
Akuntabilitas	,192	,182	1,953	0,043
Transparansi	,369	,196	2,088	0,026
Pengawasan	,459	,161	2,842	0,006

Sumber: Data primer diolah 2017

Berdasarkan Tabel 3 maka prediksi kinerja pelaksanaan anggaran dapat dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KA = 10,463 + 0,192AK + 0,369TR + 0,459PW$$

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 10,463 dan koefisien regresi Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran masing-masing sebesar 0,192; 0,369 dan 0,459. Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui:

Nilai konstanta 10,463 berarti bahwa jika seluruh variabel independen dianggap konstan yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan maka nilai variabel dependen yaitu Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 10,463. Nilai koefisien regresi Akuntabilitas sebesar 0,192 berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin Akuntabilitas variabel Transparansi dan Pengawasan dianggap konstan maka nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran akan naik sebesar 0,192. Nilai koefisien regresi Transparansi sebesar 0,369 berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin Transparansi variabel Akuntabilitas dan Pengawasan dianggap konstan maka nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran akan naik sebesar 0,369. Nilai koefisien regresi Pengawasan sebesar 0,369 berarti bahwa jika terjadi kenaikan 1 poin Pengawasan variabel Akuntabilitas dan Transparansi dianggap konstan maka nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran akan naik sebesar 0,369.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independen variabel dimana akan diukur keratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Dikatakan terjadi multikolinieritas, jika koefisien korelasi bebas lebih besar dari 0,60. Dikatakan tidak terjadi jika koefisien korelasi lebih kecil atau sama dengan 0,60. Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolinieritas:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Akuntabilitas	,495	2,021
Transparansi	,600	1,66
Pengawasan	,656	1,524

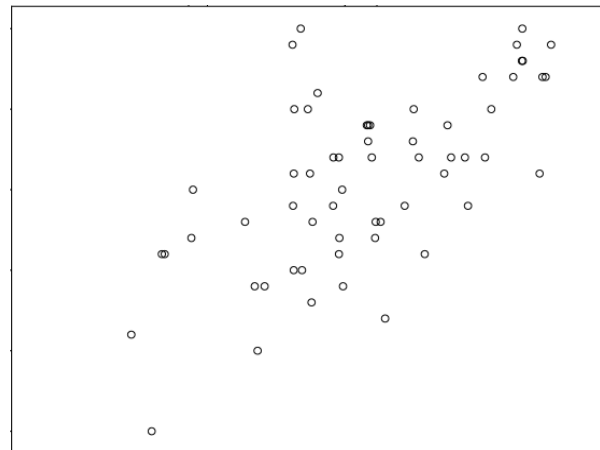
Sumber: Data primer diolah 2017

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui nilai tolerance (TOL) menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai TOL > 0.10 dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dan observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi Homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi Heteroskedastisitas. Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui grafik scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y=Y prediksi - Y riil). Scatterplot dari hasil SPSS menunjukkan titik-

titik menyebar dibawah dan diatas sumbu Y, dan tidak mempunyai pola yang teratur (Sunyoto, 2013). Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini:



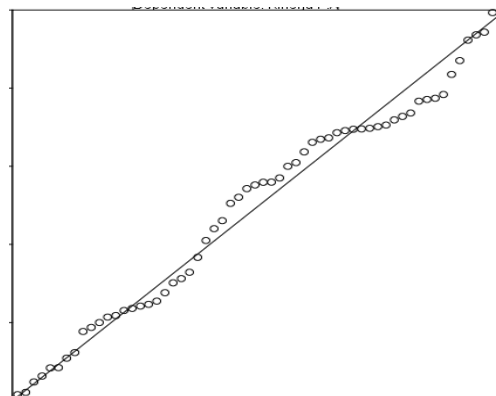
Sumber: Data primer diolah 2017

Gambar 1
Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data yang mengikuti garis normal seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2:



Sumber: Data primer diolah 2017

Gambar 2
Uji Normalitas

Berdasarkan pada Gambar 2 Normal *P-Plot Regression Standardized Residual* di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain itu untuk menguji normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogorov-*

Smirnov menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006: 115). Berikut hasil uji normalitas dapat dilihat pada perhitungan statistik pada Tabel 5 dibawah ini

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Akuntabilitas	Transparansi	Pengawasan	Kinerja P.A
N		60	60	60	60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	35.7667	31.8833	36.2667	45.7167
	Std. Deviation	4.3971	3.71936	4.31343	5.48369
Most Extreme Differences	Absolute	0.089	0.118	0.089	0.076
	Positive	0.089	0.077	0.053	0.045
	Negative	-0.069	-0.118	-0.089	-0.076
Kolmogorov-Smirnov Z		0.693	0.914	0.693	0.588
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.724	0.374	0.723	0.88

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah 2017

Berdasarkan Tabel 5 hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) akuntabilitas sebesar 0,724 > 0,05, transparansi sebesar 0,374 > 0,05, pengawasan sebesar 0,723 > 0,05, dan kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 0,880 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi normal serta memenuhi asumsi normalitas sehingga layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Analisis regresi dengan menggunakan uji F dengan signifikansi 0,05. Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model. Hasil Uji F dapat dilihat dari tabel ANOVA (Ghozali, 2011:98). Apabila nilai signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa model persamaan yang dihasilkan dikatakan layak untuk digunakan pada penelitian. Sedangkan nilai signifikansi > 0,05 menunjukkan bahwa model persamaan yang dihasilkan dikatakan tidak layak untuk digunakan pada penelitian. Berikut perhitungan yang tersaji pada Tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	723,439	3	241,146	12,852	.000 ^b
Residual	1050.744	56	18,763		
Total	1774.183	59			

Sumber: Data primer diolah 2017

Berdasarkan pada Tabel 6 maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 artinya nilai tersebut kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model persamaan

ini dapat dikatakan layak. Sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) sering pula disebut dengan koefisien determinasi majemuk (*multiple coefficient of determination*) yang hampir sama dengan koefisien r^2 . Koefisien determinasi memiliki nilai 0-1. Jika nilai mendekati 1 maka pengaruh yang terjadi semakin kuat, dan sedangkan jika nilai mendekati 0 maka terjadi pengaruh yang semakin lemah. Dari uji determinasi dihasilkan nilai R^2 sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,639 ^a	,407	,376	4,332

Sumber: Data primer diolah 2017

Berdasarkan pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *R Square* pada penelitian ini sebesar 0,407. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel penyajian akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebesar 40,70% sedangkan sisanya 59,30% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh yang signifikansi variabel independen secara individu dengan variabel dependen. Jika tingkat signifikansi dari masing-masing variabel yang diperoleh dari hasil *output SPSS*. Kriteria pengujian dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Apabila signifikansi uji t $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sedangkan apabila nilai signifikansi uji t $> 0,05$ maka H_0 diterima. Berikut ini hasil uji t menggunakan SPSS 20.0 sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized coefficients		T	Sig
	B	Std. Error		
(Constant)	10.463	5.733	1.825	0.073
Akuntabilitas	0.192	0.182	1.953	0.043
Transparansi	0.369	0.196	2.088	0.026
Pengawasan	0.459	0.161	2.842	0.006

Sumber: Data primer diolah 2017

Berdasarkan pada Tabel 8 menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

Bahwa akuntabilitas menunjukkan arah yang positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran, yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel akuntabilitas sebesar 0,043 $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh

Anugriani (2013), menyatakan bahwa bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika akuntabilitas dilakukan dengan baik dan benar, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya kinerja pelaksanaan anggaran. Dan didukung oleh penelitian lain oleh Setiyanningrum (2017) yang menunjukkan bahwa Variabel Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money*.

Bahwa transparansi menunjukkan arah yang positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran, yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel transparansi sebesar $0,026 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Anugriani (2013), menyatakan bahwa bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika transparansi dilakukan dengan baik, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya kinerja pelaksanaan anggaran. Transparansi dikatakan baik apabila pemerintah mampu memfasilitas dan memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai kinerja pelaksanaan anggaran. Dan didukung oleh penelitian lain oleh Setiyanningrum (2017) yang menunjukkan bahwa Variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Money*.

Bahwa pengawasan menunjukkan arah yang positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran, yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel pengawasan sebesar $0,006 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Anugriani (2013) menyatakan bahwa bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika pengawasan dilakukan dengan baik, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya kinerja pelaksanaan anggaran. Dapat dikatakan apabila pengawasan dilakukan secara langsung dan rutin melalui kinerja bawahan pengguna anggaran maka kinerja pelaksanaan anggaran akan terlaksana dengan benar. Dan didukung oleh penelitian lain oleh Setiyanningrum (2017) yang menunjukkan bahwa Variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep *Value for Mone*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran pada instansi pemerintah kabupaten Mojokerto. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu: (1) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good corporate governance* dimana pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. (2) Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Dimana anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. (3) Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Pengawasan itu sendiri merupakan suatu sistem sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial, dengan membandingkan pelaksanaan nyata dan pelaksanaan yang direncanakan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat mempertahankan akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran yang ekonomis, efisien dan efektif untuk mencapai pemerintahan yang baik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang lain seperti partisipasi, hukum dan aturan, responsivitas, keadilan dan kewajaran. (2) Untuk penelitian selanjutnya mempertimbangkan dalam menentukan objek penelitian yang lebih luas dengan ruang lingkup provinsi dan memperbanyak sampel penelitian. (3) Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan wawancara untuk meningkatkan pemahaman terhadap jawaban responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, P. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran. Skripsi*. Universitas Bina Nusantara. DKI Jakarta.
- Anthony dan Govindarajan. 2005. *Management Control System*. Eleventh Edition. Terjemahan F.X. Kurniawan Tjakrawala, dan Krista. Edisi Kesebelas. Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Antosius, F.A. 2003. *Corporate Governanc*. Edisi Kesatu. Prenhalindo. Jakarta.
- Anugriani, M. R. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerinth di Kabupaten Bone. Skripsi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Hassanudin. Makassar.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi ketiga. Erlangga. Yogyakarta.
- Faisal. 2003. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariabel dengan Program SPSS 1*. Edisi Kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN*. Yogyakarta.
- Herwidayatmo. 2003. *Penerapan Prinsip GCG di Pasar Modal Indonesia, Investor Indonesia*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 *Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. 18 Juni 2001. Jakarta.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Maksum, A. 2005. *Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Akuntansi Manajemen*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- _____, 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2(1). Mei 2006.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Moeljono, D. 2005. *Cultured, Budaya Organisasi dalam Tantangan*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nordiawan, D. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Nuryaman, Dan C. Veronica. 2015. *Metode Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. 3 April 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Jakarta.
- Pertiwi, D.P. 2015. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep *Value For Money* Pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Jom FEKON* 2(2).
- Pieris, J, dan N.J. Wiryawan. 2008. *Etika Bisnis & Good Corporate Governance*. Edisi Kedua. Pelangi Cendekia. Jakarta.
- Pratuvaliandry. 2005. Analisis Kinerja Badan Pengawas Daerah Kota Pare-Pare Dalam Pelaksanaan Pengawasan di Pemerintah Kota Pare-Pare. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Priyatno, D. 2013. *Olah Data Statistik Dengan Program PSPP*. MediaKom.Jakarta.
- Sanusi, A. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Setyaningrum, I. 2017, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep *Value For Money*. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Edisi keenam. Tarsito. Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- _____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, S. 2005. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Sunyoto, D. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*. Refika Aditaama. Bandung.
- Suparno, 2012. Pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, *Value for money*, kejujuran, transparansi Dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kota Dumai). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi USU. Medan.
- Terry, G.R, dan L.W. Rue. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Tunggal, Iman, Sjahputra, dan A.W. Tunggal. 2002. *Memahami Konsep Corporate Governance*. Edisi Kedua. Harvarindo. Jakarta.
- Wandari, D., N. Tri, E. Wandari, dan M. P. Adiputra. 2015. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money* Pada Instansi Pemerintah. *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 3(1)